

SKRIPSI
PERILAKU *NON-VOTING* DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA MAKASSAR 2020 (STUDI KASUS: KELURAHAN ENDE
KECAMATAN WAJO)



*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
pada Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

Disusun Oleh:

JONNY YOURI

E111 15 312

DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERILAKU NON VOTING DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
MAKASSAR 2020 (STUDI KASUS KELURAHAN ENDE
KECAMATAN WAJO)**

Di susun dan diajukan oleh :

JONNY YOURI

E 111 15 312

Akan dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Pada tanggal 5 Agustus 2022:

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Phill. Sukri, M.Si.
NIP. 197508182008011008



Dr. Sakinah Nadir, M.Si.
NIP. 197912382008122002

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. H.A. Yakub, M.Si. Ph. D.
NIP. 196212311990031023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**PERILAKU *NON-VOTING* DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
MAKASSAR 2020 (STUDI KASUS: KELURAHAN ENDE
KECAMATAN WAJO)**

Disusun dan diajukan oleh:

JONNY YOURI

E111 15 312

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada
Program Studi Ilmu Politik
Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Makassar, Jumat 5 Agustus 2022

Menyetujui,

Panitia Ujian

Ketua	: Dr. Phill. Sukri, M.Si. (.....)
Sekretaris	: Dr. Sakinah Nadir, M.Si (.....)
Anggota	: Dr. Ariana Yunus, M.Si. (.....)
Anggota	: Andi Naharuddin, M.Si (.....)
Pembimbing Utama	: Dr. Phill. Sukri, M.Si. (.....)
Pembimbing Pendamping	: Dr. Sakinah Nadir, M.Si (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jonny Youri

Nim : E11115312

Jenjang pendidikan : Strata-1 (S1)

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PERILAKU NON-VOTING DALAM PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR 2020 (STUDI KASUS: KELURAHAN ENDE KECAMATAN WAJO)**" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau melakukan kutipan tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 5 Agustus 2022



(JONNY YOURI)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah :

PERILAKU *NON-VOTING* DALAM PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR 2020 (STUDI KASUS: KELURAHAN ENDE KECAMATAN WAJO)

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari kedua orang tua penulis, sebagai penyemangat hidup didunia ini, yang sangat penulis cintai dan sayangi, Ibu Siska ham dan mendiang ayah Sandi Yauri. yang telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya, cinta dan pengorbanan keringat serta air mata. Untaian doa serta pengharapan tiada henti, yang hingga kapan dan dimanapun penulis tidak akan bisa membalasnya. Melalui penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yangtak terhingga serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mengarahkan dan memberikan semangat kepada penulis, antara lain kepada:

1. Terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si selaku rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dr. Phill. Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, dan juga selaku pembimbing utama yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
3. Bapak Drs.H. A. Yakub, M.Si, P.hD selaku Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Dr. Sakinah Nadir, M.Si selaku pembimbing pendamping yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Terkhusus kepada Bapak dan Ibu dosen penulis di Program Studi Ilmu Politik, Prof. Dr. M. Kausar Bailusy, Prof. Dr. Basyir Syam, Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.Si. Drs. H. A. Yakub, M.Si, Dr. Gustiana S.IP. M.SI, A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Imran S.IP. M.Si, Endang Sari, S.IP, M.SI, Zulhajar S.IP. MA., Haryanto, S.IP. MA., Ummi Suci Fathia B. S.IP, M.Si, Dan Dian Ekawaty, S.IP, MA Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan.
6. Seluruh Staf Pegawai Departemen Ilmu Politik, Pak Mursalim, Ibu Musriati, dan Pak syam yang senantiasa memberikan arahan dalam pengurusan berkas-berkas perkuliahan, terima kasih bapak dan ibu.

7. Kepada saudara-saudara ku Yauhamnes Yauri, Yurika Yauri, Yosep Yauri, Yuliana Maria Yauri dan ipar Willilam Chandra beserta Fatmawati dan kedua keponakan Rubin dan Revan terima kasih atas segala motivasi yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
8. Kepada sahabat collab's id, yang menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Fichri, Rifan, galank, Upi, Unil, Syarif, dery, ifan, ical Siska, Akbar, kak Indra kak Inyol. Terima kasih atas kerja sama, kebersamaan, waktu, dan Bantuannya.
9. Kepada saudara-saudara angkatanku Delegasi 2015, Wahyudin, Syifa, Ayu, Rahmat besar, Asrunil, Liza, Tias, Nindi, Nisa, Galank, Pira, Susi, Astmha, Aswita, fichri, Nita, Poces, Ningrat, Evi Lembang, Upi, Evita, Syawal, Ime, ical, Rahmat kecil, Syarif, Dianto, Dery, Ari, Adi, Siska, Kamal, Juned, lin, Vivi, Sibga, Arigie, Ifan, Mira, Fatwa. Terima kasih telah menjadi sodara yang baik dalam perjalanan belajar bersama di Ilmu Politik Fisip Unhas.
10. Keluarga Besar Himapol FISIP Unhas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan dan dorongannya selama penulis belajar lembaga. Tanpa Himapol, penulis tidak akan bisa seperti ini. Terima kasih.
11. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar PMKO FISIP Unhas yang telah menjadi rumah belajar dan bertumbuh iman penulis selama menjadi Mahasiswa.

12. Kawan seperjuangan di Kema FISIP Unhas, yang senantiasa memberikan arahan dan masukannya.
13. Terima kasih atas kerja sama, kebersamaan, waktu, dan kenangan selama KKN gelombang 99 Desa Pao.
14. Terima Kasih juga tidak lupa penulis sampaikan kepada para informan atas segala waktu yang diluangkan serta atas keterbukaan kepada penulis.

Serta kepada semua insan yang pernah berhubungan dengan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Dan sekali lagi penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuan, perhatian, dukungan, bimbingan dan kerja samanya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Makassar, 5 Agustus 2022

(JONNY YOURI)

ABSTRAK

Jonny Youri, E11115312. Skripsi yang berjudul “PERILAKU *NON-VOTING* DALAM PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR 2020 (STUDI KASUS: KELURAHAN ENDE KECAMATAN WAJO)” yang disusun di bawah bimbingan bapak Sukri selaku pembimbing utama dan ibu sakinah Nadir selaku pembimbing pendamping.

Pemilihan kepala daerah adalah sebuah proses untuk mencapai otoritas secara legal formal yang dilaksanakan atas partisipasi kandidat, pemilih (konstituen), dan dikontrol oleh lembaga penyelenggara, agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang disahkan oleh hukum yang berlaku. Kejadian-kejadian berupa perilaku tidak memilih pada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut peneliti merangkum permasalahan penelitian untuk mencari pengaruh perilaku terhadap partisipasi masyarakat Kota Makassar pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar 2020.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Ende Kecamatan Wajo Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana faktor-faktor terjadinya *Non voting* pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar 2020 tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan secara deskriptif dari data yang diperoleh faktor apa yang menjadi penyebab masyarakat tidak memberikan hak pilihnya. Selain itu data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam kepada responden.

Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa *Non Voting*, terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti psikologis pemilih yang merasa apatis terhadap penyelenggaraan pemilu, faktor kepercayaan politik yang dimana tidak adanya kedekatan antara pemilih dan kandidat, dan faktor terakhir latarbelakang sosial ekonomi dengan tingkat pendidikan tinggi serta ditambah dengan perekonomian didominasi oleh wiraswasta membuat masyarakat Kelurahan Ende memahami kondisi politik praktis dan memutuskan untuk tidak milih dengan mempertimbangkan untung dan rugi.

Kata Kunci: *Non Voting behavior*, Demokrasi, pemilihan walikota Makassar.

ABSTRACT

Jonny Youri, E11115312. Thesis entitled “non-Voting behavior in Makassar mayor Election 2020 (case study: Ende village, Wajo district) ” which was prepared under the guidance of Mr.Sukri as the main supervisor and Mrs. Sakinah Nadir as a mentor companion.

Regional Head election is a process to achieve formal legal authority that is carried out on the participation of candidates, voters (Constituents), and controlled by the organizing institution, in order to obtain legitimacy from the community authorized by applicable law. Events in the form of non-voting behavior in society. Based on this, the researchers summarized the research problems to find the influence of behavior on the participation of the Makassar City community in the 2020 Makassar mayor and deputy mayor elections.

This research was conducted in Ende Village, Wajo District, Makassar city. This study aims to describe and analyze how the factors of Non-voting in the 2020 Makassar mayor and deputy mayor elections. This study uses a qualitative descriptive method to describe descriptively from the data obtained what factors are the causes of people not giving their voting rights. In addition, the data in this study were obtained from in-depth interviews to respondents.

From the results of the study illustrates that Non Voting, occurs due to several factors such as psychological voters who feel apathetic to the organization of elections, political trust factor in which the absence of closeness between voters and candidates, and the last factor socio-economic background with a high level of education and coupled with the economy dominated by self-employed people make Ende village understand the practical political conditions and decide not to vote by considering profit and loss.

Keywords: *Non Voting Behavior*, Democracy, Makassar mayor election.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENERIMAAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pendekatan Perilaku	11
2.2 Perilaku Tidak Memilih	14
2.2.1 Faktor Psikologis.....	18
2.2.2 Sistem Politik	20
2.2.3 Kepercayaan Politik	22
2.2.4 Latar Belakang Sosial Ekonomi.....	23
2.3 Telah Pustaka	25
2.3 Kerangka Pemikiran	28
2.4 Skema Pemikiran.....	30
BAB III	31
METODE PENELITIAN	31

3.1 Tipe Penelitian	31
3.2 Dasar Penelitian.....	32
3.3 Lokasi Penelitian.....	33
3.4 Sumber Data	33
3.4.1 Data Primer	33
3.4.2 Data Skunder.....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5.1 Wawancara.....	34
3.5.2 Studi Pustaka	36
3.6 Teknik Analisis Data	37
BAB IV.....	39
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	39
4.1 Gambaran Umum Kota Makassar.....	39
4.1.1 Demografi Kota Makassar.....	39
4.1.2 Demografi Penduduk Kota Makassar	41
4.1.3 Pendidikan Kota Makassar	44
4.1.4 Kondisi Sosial Makassar	45
4.2 Gambaran Umum Kelurahan Ende.....	47
4.2.1 Demografi Penduduk Kelurahan Ende	48
4.2.2 Pendidikan Kelurahan Ende	50
4.2.3 Kondisi Sosial Kelurahan Ende	51
4.2.4 Data Perekonomian Kecamatan Tallo	52
BAB V.....	54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
5.1 Faktor Psikologis.....	54
5.2 Faktor Kepercayaan Politik.....	59
5.3 Faktor Latarbelakang sosial dan ekonomi.....	64
BAB VI.....	69
PENUTUP	69

6.1	KESIMPULAN.....	69
6.2	SARAN	71
	DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia telah selesai menyelenggaraan pesta demokrasi yaitu Pemilihan umum serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilu yang diselenggarakan 9 Desember 2020 merupakan pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan serentak se-Indonesia. Pengertian Pemilu sendiri dimuat pada Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, dengan bunyinya yaitu¹:

“Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Sistem yang menempatkan rakyat sebagai subjek pemerintahan, dimana rakyat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam suatu pemerintahan dan dilibatkan secara kolektif dalam penentuan kebijakan di suatu negara disebut sebagai sistem demokrasi. Melalui pemilihan pelaksana negara, rakyat adalah pemilik kedaulatan atas negara, yang memerintah sekaligus yang diperintah, hal itu merupakan teori sistem politik dari demokrasi. Salah satu aspek penting dari demokrasi dan merupakan hal yang banyak dipelajari terutama dalam kaitannya dengan perkembangan negara-negara berkembang adalah partisipasi politik.

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan umum.

Untuk mengukur keterlibatan masyarakat secara langsung dalam partisipasi politik, Dapat dilihat melalui penyelenggaraan pemilihan umum dimana peningkatan partisipasi pemilih menjadi acuan penilaian demokrasi baik ditingkat nasional maupun lokal.

Pada dasarnya pemilu kepala daerah langsung menjadi ruang untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, Pemilu kepala daerah ini merupakan momen yang berarti bagi masyarakat ditingkat lokal karena pertama kalinya masyarakat memilih secara langsung kandidat yang diinginkannya untuk mengisi jabatan tersebut. Ketentuan ini idealnya semakin mendorong masyarakat pemilih untuk menggunakan hak suaranya saat pemilu kepala daerah berlangsung. Namun kenyataan, tingkat kehadiran masyarakat (*voting turn out*) dalam pemilihan kepala daerah mengalami penurunan secara terus menerus. Kekhawatiran terhadap rendahnya kehadiran pemilih dalam pemilu ditenggarai oleh beberapa hal yaitu kehadiran pemilih sering dimaknai sebagai bentuk loyalitas atau kepercayaan terhadap sistem politik sudah berjalan, Sehingga ketidakhadiran diinterpretasikan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap sistem politik dan rezim yang sedang berjalan. Kecendrungan naiknya angka ketidakhadiran pun terjadi di beberapa negara dalam beberapa dekade terakhir.²

Ketidakhadiran pemilih di Indonesia dalam pemilu-pemilu pasca reformasi politik mengalami kenaikan yang signifikan. Ditingkat nasional

²Asfar Muhammad . Pemilu dan perilaku memilih 1955-2004. (jakarta:Pustaka Eureka).hal 36

pada pemilu pertama sejak reformasi politik yaitu pemilu 1999 angka golput hanya berkisar 10%, pemilu 2004 angka golput mencapai 28,34% atau naik hampir tiga kali lipat atau 300%. Sementara pada pemilu 2009 angka golput menjadi 29,01%.³ Tidak jauh berbeda dengan pemilihan ditingkat lokal, permasalahan ketidakhadiran masyarakat dalam pemilihan juga menjadi salah satu isu ketika kontestasi pemilihan kepala daerah dilaksanakan. Meningkatnya angka ketidakhadiran merupakan bentuk dari ketidaktertarikan atau bahkan bentuk apolitis dari masyarakat. Pemilihan kepala daerah seharusnya menjadi penyaluran aspirasi ditingkatan yang lebih dekat dan menyentuh langsung dengan masyarakat sebagai bentuk desentralisasi terhadap kekuasaan, akan tetapi ditingkat lokal angka partisipasi dapat digolongkan rendah, yang mana hal ini menjadi anomali ketika pemilihan kepala daerah cenderung tidak diminati dibandingkan dengan pemilihan berskala nasional dalam hal ini pilpres.

Keikutsertaan warga negara dalam kontestasi pemilihan umum merupakan rangkaian kegiatan membuat keputusan, seperti yang diungkapkan oleh Ramlan Subakti yaitu memilih atau tidak memilih.⁴ Sehingga keputusan untuk tidak memilih juga merupakan hak yang dapat mempengaruhi berbagai keputusan. Hal ini menjadi akibat yang diperoleh dari berbagai macam karakteristik perilaku politik di tengah masyarakat.

³Sri Yanuarti, 2009, Golput dan Pemilu di Indonesia. Vol 6, no 1 hal 21-32 Diakses pada tanggal 12 januari dari <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/519/327>

⁴Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta, 1999, hal. 145.

Beberapa hal penting tentang kenapa harus menggunakan hak pilihnya dengan baik. Pertama, pilihan untuk tidak memilih merupakan bentuk pemborosan terhadap anggaran belanja dan APB daerah (untuk pilkada). Kedua, golput juga akan menguntungkan calon yang belum tentu berkualitas atau disukai. Artinya, calon bisa menang hanya dengan perolehan suara rendah atau hanya mempunyai basis massa sedikit karena lebih banyak masyarakat yang memutuskan untuk tidak memilih, Ini mengakibatkan legitimasi kekuasaan calon terpilih akan berkurang. Dalam pemilihan secara langsung seperti saat ini, maka calon yang terpilih akan merasa bahwa ia pilihan “rakyat” dan bebas melakukan apa yang dikehendakinya. Justru hal ini menjadi bumerang bagi masyarakat.

Pemilihan kepala daerah Walikota Makassar diselenggarakan pada tanggal 9 desember 2020 sesuai peraturan komisi pemilihan umum nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Jumlah partisipasi pemilihan walikota Makassar 2020 sangat jauh menurun dibandingkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2019, dan jika disesuaikan dengan target nasional yaitu 77,5 %, maka penurunan di 2020 makin menambah jarak sangat jauh dari sasaran.⁵ Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar 2020 dimana pola perilaku tidak memilih menjadi isu utama yang menjadi perhatian

⁵KPU Kota Makassar Hasil pemilu Kota Makassar Di akses melalui <https://kota-makassar.kpu.go.id/web/hasil-pemilu/>pada 23 november 2021 pukul 18:45

pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), media, partai politik, peneliti dan tentu saja masyarakat umum. Hal ini tidak lepas dari jarak perolehan suara kandidat tertinggi yang hanya menyentuh angka 24,30% terhadap perolehan suara kandidat terendah 2,9% hanya terpaut 21,4% dari total DPT kota Makassar. Apabila jumlah suara tidak memilih yang menyentuh sampai 40,35% diakumulasikan ke kandidat dengan perolehan suara terendah hal ini memungkinkan berubahnya hasil pemilihan secara drastis.

Dari periode 2008 sampai 2020 sudah terjadi empat kali pemilihan walikota Makassar. Dimulai dari pemilihan 2008 yang mempunyai total suara 58%(559.996) dari total DPT(Daftar Pemilih Tetap) 934.515 suara, pada 2013 mencapai 59% (585.231) dari total DPT 1.392.297, sedangkan pada pemilihan tahun 2018 tingkat partisipasi pemilih di kota Makassar mencapai pada persentase 57%(584.406) dari total suara, dan pada periode 2020 tingkat partisipasi pemilih di kota Makassar mencapai pada 59,65%.⁶

⁶Ibid hal 1

Tabel 1.1**Jumlah Pemilih pada Pemilihan Walikota Makassar tahun 2008-2020**

No	Tahun	Jumlah Pemilih pada Pilwalkot Kota Makassar			
		Terdaftar	Menggunakan Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	% yang tidak menggunakan hak pilih
1	2008	934.515	559.996	374.519	40.08%
2	2013	1.392.297	585.231	807.066	57.97%
3	2018	1.021.714	584.406	437.310	42.80%
4	2020	901.087	537.585	363.502	40.35%

(sumber:KPU Kota Makassar,2022)

Konteks dalam skripsi ini adalah kelurahan Ende Kecamatan Wajo. Dimana pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2020 kelurahan dengan tingkat tidak memilih tertinggi se-Kota Makassar yaitu Kelurahan Ende kecamatan Wajo yang mencapai angka 57,43%. Serta jika melihat angka tidak memilih ditingkat Kelurahan se-Kota Makassar Kelurahan Ende dalam kurun waktu tiga penyelenggaraan pemilihan selalu menduduki Kelurahan dengan partisipasi terendah di Kecamatan Wajo, hal ini menjadi sebuah indikasi awal bahwa masyarakat di daerah tersebut memiliki kecenderungan untuk tidak memilih. Melihat secara demografi populasi Kelurahan Ende mencapai 3747 jiwa dan luas wilayah yang

hanya 0,16 km² dengan tingkat kepadatan penduduk 15.258.⁷ Sedangkan pada sektor perekonomian, Kelurahan Ende didominasi oleh wiraswasta dan pelajar/mahasiswa dengan jumlah pengangguran cukup tinggi. Menjadi latar belakang yang menarik jika dibenturkan dengan perilaku tidak memilih.

Pada pemilihan 2020, kelurahan Ende sendiri menduduki perolehan terendah di Kota Makassar. Sedangkan pada tingkatan kelurahan di setiap Kecamatan se-Kota Makassar terdapat 15 Kelurahan dengan angka tidak memilih tertinggi yaitu Panambungan 44,99%, Mamajang Dalam 41,47%, Lariangbangi 44,19%, Sawerigading 49,28%, Wajo Baru 49,04%, Kalukuang 48,51%, Totaka 40,05%, Masale 52,57%, Mancini Sombala 46,40%, Daya 53,48%, Batua 45,58%, Balla Parang 45,72%, Kapasa 45,51%, Barrang Lompo 31,49%, dan Ende sendiri 57,43%.

Tabel 1.2
Jumlah Pemilih Kota Makassar berdasarkan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Kelurahan Partisipasi Terendeah	Jumlah Pemilih Kota Makassar 2020			
			Terdaftar	Menggunakan Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	%Tidak menggunakan Hak Pilih
1	Mariso	Panambungan	7156	3936	3220	44,99%
2	Mamajang	Mamajang Dalam	1994	1167	827	41,47%

⁷Kelurahan Ende, Data Wilayah kelurahan Ende, <http://www.kecamatanwajo.makassar.go.id/ende/> di akses pada tanggal 4 desember 2020 pukul 21.33

No	Kecamatan	Kelurahan Partisipasi Terendah	Jumlah Pemilih Kota Makassar 2020			
			Terdaftar	Menggunakan Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	% Tidak Menggunakan Hak Pilih
3	Makassar	Lariangbangi	3084	1721	1363	44,19%
4	Ujung Pandang	Sawerigading	907	460	447	49,28%
5	Wajo	Ende	2330	992	1338	57,43%
6	Bontoala	Wajo Baru	3240	1651	1589	49,04%
7	Tallo	Kalukuang	3566	1836	1730	48,51%
8	Ujung Tanah	Totaka	1725	1034	691	40,05%
9	Panakukang	Masale	6889	3267	3622	52,57%
10	Tamalate	Mancini Sombala	13289	7122	6167	46,40%
11	Biringkanaya	Daya	8150	3791	4359	53,48%
12	Manggala	Batua	16026	8720	7306	45,58%
13	Rappocini	Balla Parang	8155	4425	3730	45,73%
14	Tamalanrea	Kapasa	5247	2859	2388	45,51%
15	Kepulauan Sangkarrang	Barrang Lompo	3242	2221	1021	31,49%

(Sumber: KPU Kota Makassar,2022)

Dalam hal ini penulis akan meneliti masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Walikota Kota Makassar. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi masyarakat sehingga tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan. Serta variabel apa sajakah yang akan digunakan agar lebih tepat untuk menjelaskan fenomena tersebut, hal ini menjadi latar belakang peneliti untuk melihat perilaku tidak memilih sehingga dapat mengetahui apa yang menyebabkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan uraian diatas, Maka penelitian ini akan dilakukan dengan judul **“PERILAKU *NON-VOTING* DALAM PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR 2020 (STUDI KASUS: KELURAHAN ENDE KECAMATAN WAJO)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, penelitian ini membatasi rumusan masalah yang akan diteliti, menjadi:

1. Apa faktor penyebab perilaku tidak memilih di Kelurahan Ende Kecamatan Wajo Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara umum dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menggambarkan serta menganalisis perilaku tidak memilih didalam masyarakat melalui pendekatan perilaku,serta faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat untuk tidak memilih.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang fenomena praktik perilaku tidak memilih di tengah sistem demokrasi yang dianut secara umum di dalam masyarakat.
- b. Sebagai sumbangan pengetahuan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik terkait tentang Perilaku Politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan acuan bagi para peneliti yang ingin meneliti terkait perilaku politik dari segi perilaku tidak memilih.
- b. Memberikan informasi kepada penyelenggara pemilu terkait masyarakat yang tidak memilih.
- c. Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis memaparkan beberapa poin yang akan digunakan sebagai pisau analisis diantaranya, pendekatan perilaku, dan perilaku tidak memilih, yang mana juga diharapkan guna membantu penulis dalam proses penelitian.

2.1 Pendekatan Perilaku

Pendekatan perilaku terhadap analisis politik dan sosial secara umum berkonsentrasi pada satu fokus utama yakni mengapa orang berkelakuan sebagaimana yang mereka lakukan. Hal yang membedakan pendekatan perilaku dengan pendekatan lain adalah bahwa: perilaku dapat diteliti (*observable behaviour*) dan penjelasan apapun tentang perilaku tersebut mudah diuji secara empiris. Kajian perilaku merupakan pendekatan yang muncul setelah adanya Perang Dunia II. Pendekatan ini dipengaruhi oleh studi ilmu sosiologi dan psikologi. Salah satu corak pemikiran pokok dari pendekatan perilaku adalah menyangkut perilaku politik, kekuasaan, atau keyakinan politik.⁸ Perilaku Politik memiliki beragam definisi atau pemaknaan. Lasswell dalam Varma memberikan penjelasan bahwa perilaku politik yaitu: Pertama, perilaku politik selalu memiliki orientasi pada suatu nilai dalam proses politik yang berlangsung dan merupakan satu bagian. Kedua, perilaku politik bertujuan menjangkau

⁸Budiharjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia2008. Hal 10

masa depan, bersifat mengantisipasi, berhubungan dengan masa lampau, dan senantiasa mempertahankan kejadian masa lampau.⁹

Perilaku politik adalah suatu bentuk keikutsertaan warga negara dengan cara yang terorganisir dalam membuat keputusan-keputusan politik, dengan keikutsertaan yang sukarela dan atas kemauan sendiri, didasari atas rasa tanggung jawab terhadap berfikir, bertindak, dan kebebasan mengemukakan pendapat.¹⁰

Adapun pada tataran terminologis, perilaku politik adalah kegiatan antara pemerintah dengan masyarakat ataupun sebaliknya yang memiliki unsur pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh para Ilmuan politik, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Ramlan Subakti, yang mengatakan bahwa interaksi antara pemerintah dan masyarakat, diantara lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara kelompok individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.

Secara lebih rinci Gabriel Almond berpendapat bahwa perilaku politik tidak hanya sebatas mengambil bagian atau peranan dalam konteks kegiatan politik. Akan tetapi, menurutnya perilaku politik selalu diawali oleh adanya artikulasi kepentingan dimana seorang individu mampu mengontrol sumber daya politik, seperti halnya seorang pemimpin

⁹ Mufti, Muslim. Teori-Teori Politik. (Bandung: Pustaka Setia, 2012). Hal. 87.

¹⁰ Ihsan Hamid. Perilaku Politik Dialektika Teoritis-Empiris Untuk Penguatan Demokrasi di Era Post Truth (Jakarta: Sanabil, 2020) hal 45

partai politik atau seorang diktator politik.¹¹ Oleh karena itu, perilaku politik menurut Almond terbagi ke dalam tiga kategori yakni artikulasi kepentingan, penyatuan kepentingan dan artikulasi kepentingan lanjutan.

Dengan demikian, maka pendekatan perilaku politik kemudian dipakai untuk melihat kegiatan dan dinamika yang terjadi dalam lingkup lembaga negara. Selain itu, perilaku politik juga dirancang sebagai suatu pendekatan ilmu politik yang menekankan pada perilaku individual sebagai objek utama analisis, tetapi dengan asumsi bahwa kelompok tersebut adalah interaksi kolektif yang terjadi antara individu.

Kemudian yang termasuk kedalam kategori perilaku politik sebagaimana umumnya yang sering terjadi menurut Gabriel Almond adalah respon-respon internal atau yang sudah umum terjadi meliputi, aktivitas pembagian suara (*voting*), diskusi politik, kegiatan kampanye, *lobbying*, protes, dan bergabung dalam kelompok kepentingan. Munculnya respon-respon internal dengan berbagai macam di atas, menurut Huntington kadang disebabkan karena tidak terdistribusikannya kekuasaan dengan adil dan merata. Sehingga mengakibatkan munculnya protes, oleh kelompok penekan dan organisasi oposisi.¹² Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perilaku politik merupakan sebuah pendekatan politik atau persepektif politik yang dikembangkan dan digunakan untuk melihat dengan lebih mengkonsentrasikan pada perilaku seseorang dari

¹¹ Gabriel Almond dan Bingham Powell, *Comparative Politics: A Developmental Approach* (Boston Little Brown and Company, 1966) Hal. 114

¹²Ibid hal 115

pada lembaga politik. yang berarti perilaku politik lebih menekankan pada aspek pola tingkah laku yang dilakukan individu dan kelompok dalam mengartikulasikan kepentingan.

Selain itu, dalam konteks masyarakat yang majemuk atau heterogen seperti Indonesia, perilaku politik masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh adanya produksi faktor-faktor sosial, ekonomi, psikologi, sejarah, politik, budaya, agama, maupun peta geopolitik dimana individu dalam suatu masyarakat tersebut berada

2.2 Perilaku Tidak Memilih

Orang yang tidak memilih dalam proses pemilihan di suatu wilayah (*non-voting*) dalam perpolitikan Indonesia sering disebut sebagai golongan putih (golput). Istilah ini mulai populer di era tahun 1970-an yang dipelopori oleh Arif Budiman, Julius Usman, dan Almarhum Imam Malujo Sumali.¹³ Golongan ini timbul akibat ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pemilu Orde Baru. Golput pada hakikatnya terdiri dari dua macam yaitu golput ideologis dan golput pragmatis/administratif. Golput ideologis adalah pemilih yang sengaja tidak memilih karena alasan-alasan politis, sedangkan golput pragmatis/administratif lebih karena tidak terdaftar sebagai pemilih atau suara tidak sah.

¹³Fadillah Putra, *Partai politik dan kebijakan publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, hal. 104

Dalam buku *Political Explore*¹⁴, beberapa ilmuwan mendefinisikan golput, yang pertama yaitu menurut Irwan H, Dulay dia mengatakan golongan putih diakronimkan menjadi golput adalah sekelompok masyarakat yang lalai dan tidak bersedia memberikan hak pilihnya dalam pemilihan dengan berbagai macam alasan, baik pada pemilihan legislatif, pilpres, pilkada maupun pemilihan kepala desa. Golput disebut juga dengan abstain atau blanko pada pemilihan terbatas pada suatu lembaga, organisasi atau perusahaan. Menurut Susan Weich, ketidakhadiran seseorang dalam pemilu berkaitan dengan kepuasan atau ketidakpuasan pemilih. Kalau seseorang memperoleh kepuasan dengan tidak menghadiri pemilu tentu ia akan tidak hadir ke bilik suara, begitu pula sebaliknya. Disamping itu, ketidakhadiran juga berkaitan dengan kalkulasi untung rugi. Kalau seseorang merasa lebih beruntung secara financial dengan tidak hadir dalam pemilu, tentu ia akan lebih suka melakukan pekerjaan lain yang lebih menguntungkan. Sehingga garis besar *non voting* atau golput adalah tindakan tidak memberikan hak pilih dalam proses pemilihan baik dengan sengaja mau tidak sengaja.

Jika melihat jumlah kehadiran pemilih pada pemilu masa Orde Baru rata-rata di atas 90%. Angka ini hanya dijumpai pada negara-negara komunis yang menerapkan hukum wajib coblos seperti pecahan Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Polandia, Rumania, Cekoslawakia, Guinea, dan sebagainya. Di negara-negara ini jumlah kehadiran pemilih mendekati

¹⁴Efriza, *Political Explore*, (bandung : Alfabeta, 2012). hal 534

100%. Sementara di negara-negara dunia ketiga, rata-rata kehadiran pemilih sangat rendah seperti halnya di negara Kuwait, Amerika Selatan, Malawi dan Bahrain yang angka kehadiran pemilihnya di bawah 20%.¹⁵ Dalam suatu negara yang menerapkan hukum wajib coblos, seseorang akan memperoleh sanksi atau denda jika tidak menghadiri pemilu. Padahal dalam realitanya, tidak semua pemilih menyukai partai atau kandidat yang sedang bertarung dalam pemilu. Akibatnya mereka harus mendatangi tempat pemungutan suara untuk kepala daerah menghindari sanksi atau denda, namun tidak mencoblos kartu suara atau bahkan merusaknya.

Perilaku *non-voting* di Indonesia tidak jauh berbeda dengan fenomena di atas. Perilaku *non-voting* dimanifestasikan dalam berbagai bentuk yaitu: Pertama, orang yang tidak menghadiri tempat pemungutan suara sebagai aksi protes terhadap pelaksanaan pemilu dan sistem politik yang ada. Kedua, orang yang menghadiri tempat pemungutan suara namun tidak menggunakan hak pilihnya secara benar dengan menusuk lebih dari satu tanda gambar. Ketiga, orang yang menggunakan hak pilihnya dengan jalan menusuk bagian putih dari kartu suara. Dalam konteks semacam ini perilaku *non voting* adalah refleksi protes atas ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berjalan. Keempat, orang yang tidak hadir di

¹⁵Sri Yanuarti, 2009, Golput dan Pemilu di Indonesia. Vol 6, no 1 hal 21-32 Diakses pada tanggal 12 Januari dari <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/519/327>

tempat pemungutan suara dikarenakan mereka memang tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak suara.¹⁶

Kekhawatiran terhadap rendahnya kehadiran pemilih dalam pemilu ditenggarai oleh beberapa hal. Pertama, kehadiran pemilih seringkali ditafsirkan sebagai bentuk loyalitas atau kepercayaan pada sistem politik yang ada, sehingga ketidakhadiran diinterpretasikan sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada sistem politik atau rezim yang sedang berjalan. *Kedua*, adanya kecenderungan naiknya angka ketidakhadiran memilih di beberapa negara dalam beberapa dekade terakhir ini.

Negara Indonesia sendiri ketidakhadiran pemilih dalam pemilu-pemilu pasca reformasi politik juga mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tingkat nasional, pemilu pertama sejak reformasi politik yaitu pemilu 1999 angka golput hanya berkisar 10%, pemilu 2004 angka golput mencapai 28,34% atau naik hampir tiga kali lipat atau 300%. Sementara pada pemilu 2009 angka golput menjadi 29,01%.¹⁷ Pengertian golput yang lebih rinci dikemukakan oleh M. Asfar (1998) yaitu: orang yang tidak menghadiri tempat pemungutan suara sebagai aksi protes terhadap pelaksanaan pemilu atau sistem politik yang ada; orang yang menghadiri tempat pemungutan suara namun tidak menggunakan hak pilihnya secara benar, seperti menusuk lebih dari satu gambar; orang yang menggunakan hak pilihnya tetapi menusuk pada bagian putih dari kartu suara; dan orang

¹⁶Ibid hal 21

¹⁷ Ibid.hal 19

yang tidak menggunakan hak suara karena tidak adanya motivasi untuk memilih. Dalam Skripsi ini pengertian tidak memilih merujuk pada pengertian yang disampaikan oleh M. Asfar dan tidak termasuk pemilih yang tidak memilih karena faktor kelalaian atau situasi-situasi yang tidak bisa dikontrol oleh pemilih.

David Moon menjelaskan bahwa terdapat dua pendekatan untuk menjelaskan Perilaku Tidak Memilih (*non-voting behavior*) dalam suatu pemilu. Pertama, menekankan pada karakter sosial dan psikologi pemilih serta karakteristik institusional sistem pemilu. Sementara pendekatan kedua menekankan harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih.¹⁸ Menurut kedua pendekatan tersebut, setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi seseorang untuk tidak memilih yaitu.

2.2.1 Faktor Psikologis

Penjelasan *non-voting Behavior* dari faktor psikologi pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. Kedua, berkaitan dengan orientasi kepribadian. Penjelasan pertama melihat bahwa perilaku *non-voting* disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan sebagainya. Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak toleran atau tak acuh cenderung untuk tidak

¹⁸ Ibid hal 24

memilih, sebab apa yang diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan kepentingan perorangan secara langsung, betapapun mungkin hal itu menyangkut kepentingan umum yang lebih luas. Dalam konteks semacam ini, para pemilih yang mempunyai kepribadian tidak toleran atau tak acuh cenderung menarik diri dari percaturan politik langsung dikarenakan tidak berhubungan dengan kepentingannya. Sementara itu, penjelasan kedua lebih menitik-beratkan faktor orientasi kepribadian. Penjelasan kedua ini melihat bahwa perilaku *non-voting* disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih, yang secara konseptual menunjukkan karaktersitik apatis, anomi, dan alienasi.

Secara teoritis, perasaan apatis sebenarnya merupakan jelmaan atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, yang secara sederhana ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan politik. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya sosialisasi atau rangsangan (stimulus) politik, atau adanya perasaan (anggapan) bahwa aktifitas politik tidak menyebabkan perasaan kepuasan atau hasil secara langsung. Anomi merujuk pada perasaan tidak berguna. Mereka melihat bahwa aktifitas politik sebagai sesuatu yang sia-sia, karena mereka merasa tidak mungkin mampu mempengaruhi peristiwa atau kebijaksanaan politik. Bagi para pemilih semacam ini, memilih atau tidak memilih tidak mempunyai pengaruh apa-apa, karena keputusan-keputusan politik seringkali berada di luar kontrol para pemilih yang

mana orang yang akhirnya terpilih biasanya menggunakan logika-logikanya sendiri dalam mengambil berbagai keputusan politik, dan dalam banyak hal mereka jauh berada di luar jangkauan para pemilih. Perasaan *powerlessness* (Ketidakberdaya) inilah yang disebut sebagai anomie.

Berbeda dengan *powerlessness* (Ketidakberdaya), alienasi berada di luar apatis dan anomie. Alienasi merupakan perasaan keterasingan secara aktif. Seseorang merasa dirinya tidak terlibat dalam banyak urusan politik. Pemerintah dianggap tidak mempunyai pengaruh terutama pengaruh baik terhadap kehidupan seseorang. Bahkan pemerintah dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai konsekuensi jahat terhadap kehidupan manusia. Jika perasaan alienasi ini memuncak, mungkin akan mengambil bentuk alternatif aksi politik, seperti melalui kerusuhan, kekacauan, demonstrasi dan sebagainya.

2.2.2 Sistem Politik

Secara teoritis belum ada kesepakatan yang pasti adanya hubungan antara demokratis tidaknya sistem politik dengan kuantitas kehadiran atau ketidakhadiran pemilih dalam suatu pemilu. Kenyataan menunjukkan kehadiran dan ketidakhadiran dalam pemilu tidak secara jelas menunjukkan adanya hubungan kedua variabel tersebut. Misalnya di Amerika Serikat sebagai negara yang disebut kampiun demokrasi, jumlah kehadiran pemilih dalam pemilu tergolong rendah, rata-rata hanya 50% saja. Sebaliknya di negara-negara Eropa Barat seperti Italia,

Denmark, Belgia, Austria, Jerman dan sebagainya, yang tingkat demokrasiya cukup baik, tingkat kehadiran pemilih mencapai 90%.¹⁹

Salah satu hasil penelitian yang menunjukkan hubungan antara sistem politik dengan tingkat kehadiran pemilih adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Tingsten. Hasil studi Tingsten menyimpulkan bahwa di negara-negara yang menerapkan sistem pemilu atau sistem perwakilan berimbang (proporsional) seperti negara-negara Eropa Barat, rata-rata partisipasi pemilih cukup tinggi. Sementara negara-negara yang menerapkan sistem distrik, jumlah kehadiran pemilih relatif rendah. Hal ini dikarenakan, dalam sistem perwakilan berimbang, perolehan kursi sangat tergantung pada proporsi jumlah suara pemilih. Sementara itu, dalam sistem distrik perolehan kursi sangat ditentukan oleh mayoritas suara yang diperoleh. Sehingga para pemilih yang menerapkan sistem proporsional mempunyai semangat yang lebih besar untuk memilih betapapun mereka menyadari partai atau kandidat yang dipilihnya akan kalah di wilayahnya, sebab suaranya tidak hilang karena digabungkan dengan perolehan suara didaerah pemilihan lainnya. Pandangan Tingsten ini barangkali dapat menjelaskan fenomena tingginya angka partisipasi politik dalam pemilu di negara-negara Eropa Barat.²⁰ Dengan faktor sistem yang lebih menitik beratkan pada penyelenggara negara menjadi aspek utama yang mempengaruhi

¹⁹Sri Yanuarti, 2009, Golput dan Pemilu di Indonesia. Vol 6, no 1 hal 21-32 Diakses pada tanggal 12 januari dari <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/519/327>

²⁰ Ibid hal 24

jumlah tidak memilih pada sistem pemilihan yang digunakan pada suatu negara.

2.2.3 Kepercayaan Politik

Dalam konteks *non-voting behavior*, kepercayaan pada sistem politik yang ada dapat mempengaruhi tingginya angka ketidakhadiran pemilih. Konsep kepercayaan politik digunakan untuk menjelaskan keaktifan dan ketidakaktifan (*inactivity*) seseorang dalam dunia politik. Ketidakaktifan dalam konsep ketidakpercayaan politik sendiri selalu mengandung pengertian ganda. Pertama, ketidakaktifan dapat diinterpretasikan sebagai ekspresi atas kepercayaan yang rendah terhadap sistem politik atau sebagai ekspresi atas perasaan keterasingan (alienasi). Kediktatoran militer di masa Yunani misalnya, sulit untuk menghasilkan persentase pilihan “ya” yang cukup tinggi dalam suatu pemungutan suara konstitusi (plebisit konstitusional) yang diharapkan.

Pada sisi lain, ketidakaktifan juga dapat diinterpretasikan sebagai ekspresi kepercayaan yang tinggi, dimana ketidakaktifan seseorang dalam bilik suara menandakan bahwa mereka puas terhadap sistem politik yang ada, atau tidak khawatir dengan keadaan politik yang ada. Mereka baru aktif atau berpartisipasi apabila mereka benar-benar kecewa terhadap sistem politik atau keadaan yang ada.²¹

²¹Ibid hal-23

Penelitian A. Gamson mencoba menjelaskan bahwa kepercayaan pada sistem politik yang ada dapat mempengaruhi tingginya angka ketidakhadiran pemilih. Misalnya, ada bukti kuat bahwa partisipasi dalam sistem politik meningkat pada saat terjadi krisis. Dengan begitu, ketidakaktifan seseorang menandakan bahwa mereka puas terhadap sistem politik yang ada, atau paling tidak khawatir terhadap keadaan yang ada. Mereka baru aktif atau berpartisipasi apabila mereka benar-benar kecewa terhadap sistem politik atau keadaan yang ada. Dalam kondisi demikian, ketidakaktifan merupakan suatu pertanda keyakinan atau kepercayaan terhadap sistem politik yang ada.²²

Kepercayaan politik juga berhubungan dengan penilaian seseorang terhadap kinerja dan *performance* pemerintah. Apakah seseorang menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan maupun dalam pelaksanaan pemerintahan dalam suatu sistem politik.

2.2.4 Latar Belakang Sosial Ekonomi

Setidaknya ada tiga indikator yang biasa digunakan untuk menjelaskan status sosial ekonomi yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan pekerjaan. Wolfinger seperti yang dijelaskan M. Asfar (1998) menyimpulkan bahwa ada beberapa alasan mengapa tingkat

²²Muhammad, Asfar, *Presiden Golput*, (Jakarta : Jawa Pos Press, 2004), hal. 35-51

status sosial ekonomi berkorelasi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih. Pertama, tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, disamping memungkinkan seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi, baik pada saat pendaftaran maupun pemilihan. Kedua, pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya dalam pemilu dibandingkan para pemilih yang bekerja pada lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan pemerintah. Para pegawai negeri atau pensiunan misalnya, menunjukkan tingkat kehadiran memilih lebih tinggi dibanding yang lain. Sebab para pegawai negeri ini sering terkena langsung dengan kebijakan pemerintah seperti kenaikan gaji, pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya. Ketiga, pendapatan yang tinggi memudahkan orang untuk menanggung beban finansial akibat keterlibatannya dalam proses pemilu. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kehadiran selalu menunjukkan arah yang berlawanan. Pemilih yang tingkat pendidikannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu yang cukup tinggi. Sebaliknya, pemilih yang berpendidikan tinggi cenderung angka ketidakhadirannya dalam pemilu rendah. Sementara itu hubungan antara tingkat pendapatan

dengan tingkat ketidakhadiran juga menunjukkan pola yang sama. Para pemilih yang tingkat pendapatannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu cukup tinggi. Sebaliknya, para pemilih dengan latar belakang pendapatan tinggi cenderung angka ketidakhadirannya dalam pemilu rendah. Tetapi beberapa kasus menunjukkan bahwa yang mempunyai “status menyilang” justru cenderung tidak memilih. Misalnya, seorang pemilih yang tingkat pendidikannya tinggi dan pendapatannya rendah, seorang pemilih yang berlatar belakang Islam-santri dari keluarga PPP namun bekerja sebagai PNS dan sebagainya.

Pendapat yang cukup sederhana dalam menjelaskan faktor-faktor penyebab seseorang yang mempunyai hak pilih tidak ikut dalam pemilu disampaikan oleh Mc Closky. Hal ini secara detail dijelaskan oleh Miriam Budiardjo sebagai berikut: pertama, bersikap acuh tak acuh dan tidak tertarik oleh, atau kurang paham mengenai masalah politik; kedua, karena tidak yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah tidak akan berhasil; dan yang terakhir, sengaja tidak memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada dalam lingkungan dimana ketidakikutsertaan merupakan hal yang terpuji.²³

2.3 Telah Pustaka

Salah satu cara penyusunan skripsi ini berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang berupa karya tulis terdahulu

²³ Budiardjo, M. (1998). Partisipasi dan Partai Politik . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

yang memiliki relevansi terhadap topik yang di teliti oleh penulis. Hal itu untuk menghindari penelitian berulang tentang perilaku tidak memilih. Penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas penyusun. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun.

1. Darmawan Purba Suswondo, dalam jurnalnya “Perilaku non voting dalam pemilihan kepala daerah Lampung Timur 2015”. dalam penelitian ini lebih berfokus pada empat faktor yang menyebabkan tingginya angka tidak memilih adapun faktor tersebut yaitu faktor teknis, faktor teknis politis, faktor politis, faktor ideologis. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan pada faktor teknis yang menjadi penyebab utama tingginya angka *non voting*.²⁴
2. Mas Rizal Ricardo Sagala, skripsi dengan judul “Fenomena Golput di Kalangan Mahasiswa pada PEMILU Serentak 2019” dengan bertitik fokus pada kalangan Mahasiswa sehingga dapat diasumsikan kelompok terdidik secara politik merupakan objek dalam penelitian ini yang sadar dengan pilihan untuk tidak

²⁴Suwondo Darmawan Purba, 2017, Prilaku non voting dalam pemilihan kepala daerah Lampung Timur 2015, vol1, no1, diakses pada tanggal 24 juni

memberikan hak pilihnya. dengan menggunakan teori pilihan rasional James Coleman untuk membeda²⁵.

3. Sholihin di dalam skripsi “Hak tidak memilih dalam pemilu di Indonesia (Studi tentang prinsip demokrasi dan negara hukum).” Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum dengan demikian proses bagi pelaksanaan untuk mewujudkan kedaulatan yang ada ditangan rakyat itu sendiri haruslah diatur melalui mekanisme hukum, selama tidak ada aturan per Undang-undangan yang mengatur bahwa hak untuk tidak memilih dalam pemilu dilarang maka selama itu pula keikutsertaan pemilih dalam pemilu harus diartikan sebagai hak yang mutlak, hak tersebut mencakup hak untuk ikut memilih maupun hak untuk tidak ikut memilih dalam pemilu sebagai suatu keyakinan politik masing-masing warga negara.²⁶

Dengan melihat beberapa penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel serta objek penelitian yang memiliki perbedaan secara konsep dan landasan pikir. Dimana dalam penelitian ini memiliki fokus utama terkait perilaku masyarakat yang menjadi variabel inti terkait fenomena tidak memilih pada lokasi penelitian. Dengan pendekatan Perilaku serta

²⁵Mas Rizal Ricardo Sagala, 2020, Fenomena Golput di Kalangan Mahasiswa pada PEMILU Serentak 2019 (studi pada Mahasiswa FISIP USU Medan), Medan : Universitas Sumatra Utara

²⁶Sholihin, 2004, “Hak Tidak Memilih Dalam Pemilu di Indonesia (Studi Tentang Prinsip Demokrasi dan Negara Hukum” Skripsi, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia

teori Perilaku Tidak Memilih yang dikemukakan oleh David Moon untuk menggambarkan serta menganalisa perilaku tidak memilih.²⁷

2.3 Kerangka Pemikiran

Masyarakat Indonesia telah selesai menyelenggarakan pesta demokrasi yaitu Pemilihan umum serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilu yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020 merupakan pemilihan Kepala Daerah di beberapa tempat, salah satunya Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Pemilihan para wakil rakyat yang akan duduk di lembaga eksekutif ini merupakan perwujudan dari sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Jika melihat target nasional, perolehan partisipasi memilih di Kota Makassar tidak mencapai target yang sebanyak 77,5%. Partisipasi pemilih di Kota Makassar hanya mencapai 59,66%. Hal ini menjadi sorotan pada tingginya daftar pemilih yang tidak menyalurkan hak suaranya. Apa lagi melihat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang selalu tidak mampu menyentuh angka 60% pemilih di empat pemilihan terakhir.

Tingginya angka tidak memilih menjadi hal yang disoroti di setiap penyelenggaraan pemilihan baik itu ditingkatan nasional, maupun tingkat lokal. Jika melihat angka partisipasi pemilih berdasarkan wilayah, Kelurahan Ende Kecamatan Wajo Kota Makassar, merupakan wilayah dengan angka partisipasi pemilih terendah dipemilihan Walikota dan Wakil

²⁷ Sri Yanuarti, 2009, Golput dan Pemilu di Indonesia. Vol 6, no 1 hal 21-32 Diakses pada tanggal 12 Januari dari <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/519/327>

Walikota Makassar yang hanya mencapai 43,95% dari daftar pemilih tetap (DPT). Indikator ini mengindikasikan bahwa masyarakat diwilayah tersebut cenderung tidak memberikan hak suaranya pada kontestasi pemilihan.

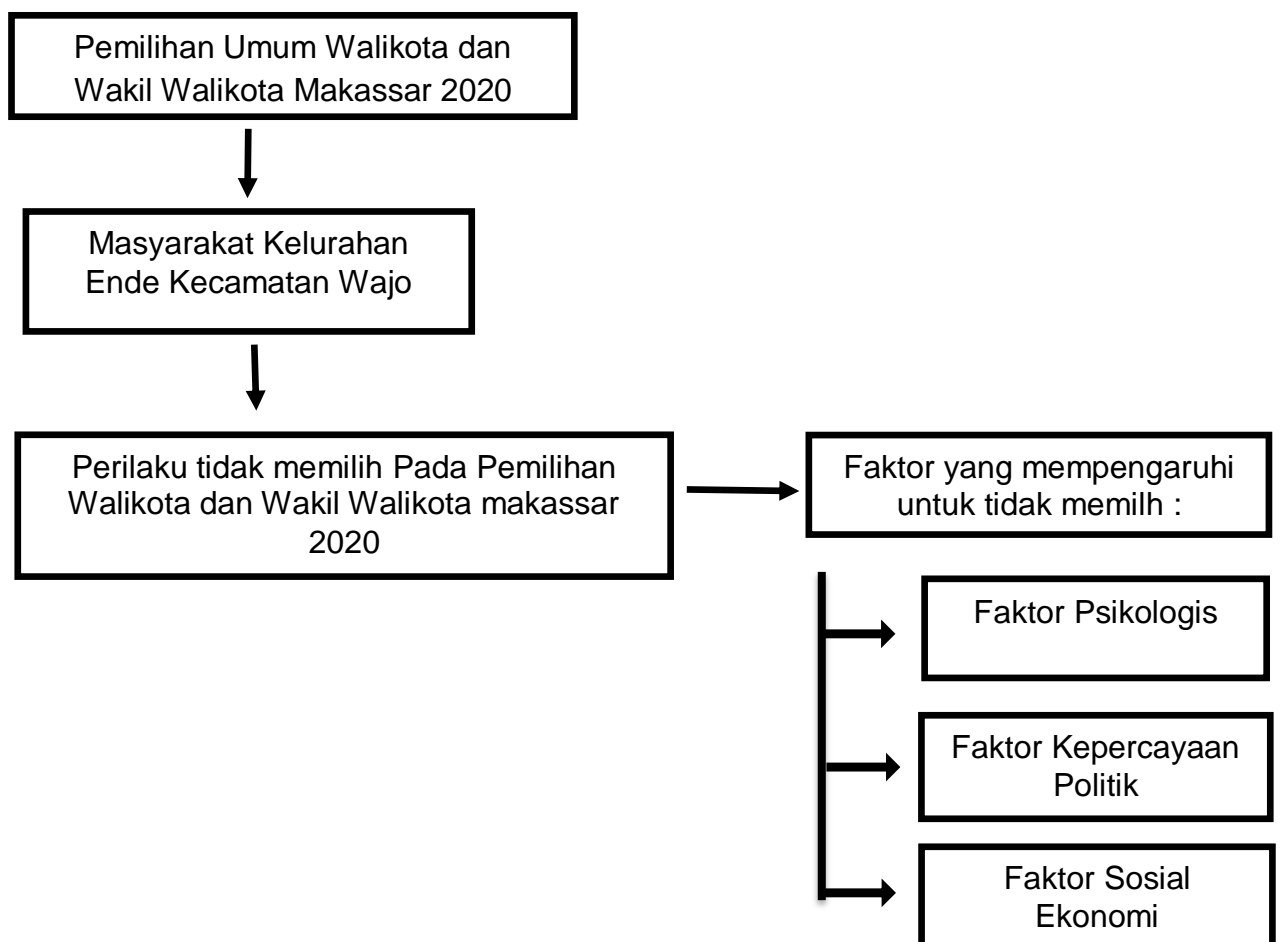
Jika merujuk pada teori dari David Moon yang digunakan untuk mengetahui perilaku masyarakat sehingga tidak mau memberikan hak politiknya, maka dapat dilihat dengan tiga faktor yakni ; *Pertama*, aspek psikologis mengapa kepribadian menjadi acuan untuk tidak memilih. *Kedua*, kepercayaan politik lebih pada pandangan satu arah dari masyarakat terhadap kinerja, baik itu diranah lembaga maupun aktor politik. dan *Ketiga*, latar belakang sosial ekonomi.²⁸ Sedangkan pada faktor *Keempat*, yaitu sistem politik diartikan sebagai tindakan yang lebih kurang langsung berkaitan dengan keputusan-keputusan yang berasal dan mengikat masyarakat. Dimana faktor sistem politik memfokuskan pada karakteristik institusional dalam model kepemiluhan disuatu negara, sebagai acuan yang berdampak pada jumlah partisipasi tidak memilih pada suatu wilayah. Sehingga dalam penelitian ini faktor sistem politik tidak dimasukkan.

Memperhatikan latar belakang kelurahan Ende yang merupakan wilayah yang tidak terlalu luas secara geografis dengan perniagaan menjadi sektor utamanya, dimana sebagian besar merupakan wiraswasta, serta tingkat pendidikan yang didominasi tamatan SLTA dan memiliki latar belakang sosial yang beragam, maka penulis memakai teori

²⁸ Ibid hal-23

yang dipaparkan David Moon untuk melihat perilaku tidak memilih, Serta teori ini juga hanya menggunakan tiga faktor untuk memetakan perilaku masyarakat mengapa tidak memberikan hak politiknya pada proses pemilihan.

2.4 Skema Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan beberapa poin sebagai penunjang dalam penelitian dilapangan seperti, tipe dan dasar penelitian, lokasi penelitian, sumber data yakni data primer, data sekunder serta, teknik pengumpulan data yang terbagi atas dua berupa wawancara, dan studi pustaka, poin terakhir yakni analisis data yang terbagi atas tiga reduksi, *display* data, dan kesimpulan/verifikasi.

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Studi kasus memperlihatkan semua aspek yang penting dari suatu kasus untuk di teliti. Dengan menggunakan tipe penelitian ini akan dapat diungkapkan gambaran yang mendalam dan mendetail tentang suatu situasi atau objek. Kasus yang akan diteliti dapat berupa satu orang, satu peristiwa atau kelompok yang cukup terbatas, sehingga peneliti dapat mengkhayati, memahami, dan mengerti bagaimana objek itu beroperasi atau berfungsi dalam latar alami yang sebenarnya.²⁹

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah lebih dalam mengenai perilaku tidak memilih di kelurahan Ende Kecamatan Wajo kota Makassar. Penulis menggunakan dasar penelitian studi kasus (*case*

²⁹A. yusuf muri.2017.metode penelitian kualitatif dan gabungan. Pt fajar interpretama mandiri. Hal. 339